



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM JAYAPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MINARTO**
2. Jabatan : **PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**
3. NHK : **641632**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 147.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z CW Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 59.338.623**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.063.838.623

III. HUTANG Rp. 212.804.995**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 851.033.628

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.